

ILMU KEPOLISIAN DAN IMPLEMENTASINYA PADA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN

Priyo Wira Nugroho^{1*}

Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan, Ilmu Kepolisian mempunyai paradigma atau sebuah sudut pandang ilmiah yang mencakup epistemology, aksiologi dan sebagai sebuah sistem²

Ilmu Kepolisian adalah Ilmu Pengetahuan

Dalam pemahaman tentang Ilmu Kepolisian, apabila ditelaah lebih rinci sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip antara Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu multi bidang dan Ilmu Kepolisian sebagai ilmu antar bidang. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang dipandang dari sudut epistemology, ontology dan metodologi. Multi bidang merupakan ilmu yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Ilmu Kepolisian terbentuk sebagai hasil penggabungan unsure-unsur pengetahuan yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, diantaranya pengetahuan ilmu alamiah (seperti: kimia forensik, dan lain-lain), ilmu sosial (seperti: kriminologi, dan lain-lain) dan ilmu budaya (seperti: antropologi, dan lain-lain). Dalam perkembangannya, Ilmu Kepolisian diperkaya dengan unsur-unsur baru yang berasal dari berbagai cabang ilmu pengetahuan lain. Diantaranya seperti : dari sosiologi diperoleh pengetahuan tentang hubungan antara kepolisian dan masyarakat; dari Antropologi diperoleh pengetahuan antropologi hukum; dari Ilmu Manajemen diperoleh pengetahuan Manajemen Kepolisian; dari psikologi diperoleh pengetahuan Psikologi Forensik dan Psikologi Kepolisian;

1 * Master Ilmu Kepolisian + Pengajar KIK-UI & PTIK, Anggota Staf PTIK

2 Disampaikan pada seminar dan Lokakarya tentang " Pengembangan Kurikulum Pendidikan Perwira Polri" diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Partnership Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 23-24 Oktober 2001. Dengan pemahaman definisi, Epistemologi adalah sebuah kajian filsafat dan atau kajian itu sendiri, yaitu sebuah teori mengenai hakekat pengetahuan dari suatu bidang ilmu pengetahuan. Ontologi, adalah kejelasan mengenai keberadaan suatu bidang ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan bidang atau bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya. Aksiologi, adalah penjelasan mengenai hakekat nilai-nilai dan penilaian mengenai sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Metodologi, adalah sebuah sistem berisikan prinsip-prinsip, praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang dipunyai oleh sesuatu bidang ilmu pengetahuan.

dari Psikiatri diperoleh pengetahuan Psikiatri Forensik; dari pengetahuan hukum diperoleh pengetahuan Hukum Kepolisian; dari filsafah diperoleh pengetahuan Etika Kepolisian; dari sejarah diperoleh pengetahuan Sejarah Kepolisian dan Sejarah Kejahatan; dari kimia diperoleh pengetahuan Toksikologi dan Kimia Forensik (pigman cat, dan sebagainya); dari geologi diperoleh pengetahuan Geologi Forensik (jenis tanah); dari fiika diperoleh pengetahuan Balistik; dari komunikasi diperoleh pengetahuan Komunikasi Kepolisian; dari statistika diperoleh pengetahuan Statistika Kejahatan; dan dari fisika diperoleh pengetahuan tentang pengaturan arus lalu lintas.

Ilmu Kepolisian didalam perjalanan sejarah dan perkembangan suatu ilmu pengetahuan, menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki identitas tersendiri dan berkembang secara luas, dari yang semula hanya bersifat pendidikan professional dan menjadi pendidikan yang lebih bersifat akademik intelektual. Dengan demikian, tentu saja nantinya diharapkan dapat melahirkan pakar-pakar, ilmuwan-ilmuwan, *scientist* serta pemikir-pemikir yang memiliki konsentari keilmuan pada bidang kepolisian. Sedangkan operasionalisasi Ilmu Kepolisan dalam organisasi Polri terletak dalam kemampuan cara pandang dan berfikir pimpinan Polri dalam menentukan kebijakannya.

Kemampuan professional dan proporsional yang dimiliki pimpinan Polri sangat menentukan keberhasilan tugas-tugas kepolisian. Dengan latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan yang sudah dilalui dan dialami, baik pendidikan formal kepolisian maupun pendidikan non formal kepolisian atau pendidikan kejuruan yang lebih ditekankan kepada kemampuan teknis kepolisian dan juga dengan pengalaman tugas-tugas yang pernah dihadapi, serta beberapa referensi ilmu pengetahuan yang terkait dengan dunia kepolisian yang didapat dari Negara-negara maju, merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh bagi pimpinan Polri untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah strategis organisasi Polri pada masa mendatang.

Tantangan tugas yang dapat diprediksikan akan semakin kompleks sebagai dampak pengaruh globalisasi pada semua aspek kehidupan, tentu saja akan berpengaruh pula terhadap penyiapan postur Polri yang dapat menyetarakan dengan tantangan tersebut, diantaranya :

- (1) Sistem pembinaan pendidikan dan pelatihan serta penguasaan seluruh bidang Ilmu Kepolisian dan hukum perundang-undangan;

- (2) Sistem pembinaan Sumber Daya Manusia dan Sumber-sumber daya lainnya;
- (3) Sistem penggelaran kekuatan dan kemampuan Polri dalam mengantisipasi tingkat ancaman yang dihadapi Polri pada masa mendatang (kemampuan-kemampuan operasional Polri dan koordinasi operasional lintas sektoral)

Lembaga pendidikan; praktek lapangan dan lingkungan masyarakat, merupakan 3 (tiga) unsur yang sangat berperan didalam pertumbuhan suatu ilmu, termasuk Ilmu Kepolisian di Indonesia, sehingga dapat saja menghasilkan arti dan isi yang tidak sama pada negara-negara lainnya yang memiliki aspek-aspek yang berbeda. Mungkin dapat diartikan bahwa sifat yang bersifat universal dari keilmuannya adalah hanya keilmuan serta budaya masyarakat dan lingkungan yang ditemukan sangatlah berbeda. Karena hal ini dapat disimpulkan bahwa landasan falsafah yang digunakan atau diterapkan juga berbeda-beda. Ilmu Kepolisian (*polica science, police studies*, atau kajian kepolisian) menurut Suparlan (1999) didefinisikan sebagai berikut :

"Sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, mempelajari upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan, dan mempelajari teknik-teknik penyelidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya".

Dalam perjalanan sejarah dan perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia, yang dimulai sejak embrional sebagai kumpulan pengetahuan-pengetahuan, yang kemudian diarahkan untuk menyusun suatu Ilmu Kepolisian sebagai cabang ilmu baru (melalui tahap-tahap) pengkajian, penyusunan konsep-konsep dan pementapan tentang konsep yang terus dikembangkan) Ilmu Kepolisian terus berkembang sebagai ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah mencapai tahap final, selalu bersifat *tentative* untuk menemukan hal-hal yang baru yang bisa dikembangkan dalam penyempurnaannya. Walaupun masih belum terdapat kesepakatan tentang definisi Ilmu Kepolisian secara legitimasi, namun obyek studinya telah meluas, menyangkut segala aspek sosial dan budaya dari lingkungan aparat polisi. Ilmu Kepolisian, sebagaimana layaknya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, selalu mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dinamika kehidupan manusia, dan juga tentu saja selalu berkembang serta tidak pernah akan mencapai tahap yang final dan selalu menghadapi proses-proses pengkajian secara ilmiah (falsifikasi).

Paradigma atau dapat diartikan dengan seperangkat cara memandang dan memperlakukan suatu obyek atau fenomena (dalam menginterpretasikan beberapa gejala-gejala serta dalam bertindak, yang merupakan suatu perwujudan nilai-nilai serta beberapa keyakinan-keyakinan mengenai suatu kebenaran) yang digunakan oleh para ahli, pakar kepolisian didalam mengemukakan pendapat, wacana ataupun pandangan terhadap suatu fenomena dalam bentuk konsep-konsep baru atau bahkan melahirkan suatu teori baru dalam dunia pengetahuan.

Demikian pula halnya dengan Ilmu Kepolisian di Indonesia dewasa ini, kerangka kerja (*framework*) yang merupakan aspek penting atau fase (bagian) penting yang menunjukkan akan batasan serta isi dari suatu satuan (*entity*), baik yang berupa wacana maupun berupa konsep. Demikian halnya dengan Ilmu Kepolisian sebagai suatu konsep "*body of knowledge*", juga harus memiliki kerangkanya, diantaranya adalah:

- a. Unsur manusianya,
- b. Unsur lingkungannya,
- c. Unsur, kelembagaannya,
- d. Unsur kegiatan dan prosesnya,
- e. Unsur sarana yang dipakai,
- f. Unsur sasaran dari kegiatan,
- g. Unsur tujuan yang hendak dicapai

PTIK sebagai Wahana Akademik Polri

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), yang merupakan lembaga pendidikan Polri jenjang sarjana atau strata I (S-1) sebagai satu-satunya wahana akademik yang mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia, mengutamakan pendidikan akademis dan merupakan pendidikan kedinasan Polri didalam menyiapkan perwira-perwira Polri yang memiliki pengetahuan dan kemampuan manajemen kepolisian menengah (*middle Police management capability*) yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di Polri. PTIK mengemban fungsi ganda, diantaranya: yang *pertama* adalah PTIK sebagai lembaga pendidikan yang

memberikan "*akademische vorming*" bagi para kader-kader kepolisian masa depan yang akan siap dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab berat pada bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pada lingkungan masyarakat Indonesia yang majemuk dan *multi cultural*, turut serta dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia (*ideal state*). Sedangkan fungsi kedua, PTIK yang kemudian berkembang adalah suatu lembaga yang dapat menggali dan mengembangkan Ilmu Kepolisian, yang tentu saja akan bisa menjadi landasan keilmuan, pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas (*mission*) yang menjadi tanggung jawab akademisi bagi para alumnusnya.

Di dalam perjalanan dan sejarah PTIK selama ini, PTIK telah menunjukkan pelaksanaan kedua fungsi tersebut secara bersamaan dan sinergi (*simultan*), melalui beberapa piranti-piranti yang melekat pada lembaga PTIK, diantaranya adalah:

Para Dosen yang menanamkan pemahaman lingkup Ilmu Kepolisian, serta para mahasiswa yang menyerap dan mendalaminya, sebagai bahan dasar yang akan diamalkan dalam praktek kepolisian dikemudian hari

Perpustakaan PTIK yang menyediakan referensi, bahan acuan untuk pengkajian dan penelitian, penyusun konsep-konsep dan teori-teori dalam berbagai bidang Ilmu Kepolisian, sehingga memungkinkan upaya-upaya pengembangannya pada arah yang maksimal

Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) beserta kelompok ahlinya, yang berkewajiban untuk merencanakan dan melakukan kegiatan penelitian peraktek kepolisian, yang hasil-hasilnya berfungsi untuk mengembangkan lembaga PTIK, maupun muatan ilmu-ilmu pengetahuan dan akan memberikan arah kepada perkembangannya di kemudian hari.

Jurnal Ilmu Kepolisian, sebagai media komunikasi akademi dan perkembangan Ilmu Kepolisian, untuk dapat menampung dan penyebaran gagasan baru mengenai perkembangan dan isu-isu Kepolisian, baik yang diterima dari warga civitas akademi PTIK, khususnya para alumni-alumni, maupun dari para pemerhati maupun ilmuwan, yang dapat memperkaya materi serta kandungan Ilmu Kepolisian.

Para Pengelola Lembaga, terutama Gubernur PTIK dan Dekan PTIK serta para anggota senat PTIK, sebagai Pembina lembaga dan Pembina akademis, dan juga para staf pengajar, penyelenggara seluruh rangkaian program pendidikan yang

diselenggarakan di PTIK, memiliki peran dan fungsi serta tanggung jawab di dalam menentukan arah perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia.³

Disamping peran lembaga PTIK di dalam pengembangan Ilmu Kepolisian, peran para praktisi Kepolisian, terutama para alumni PTIK, turut menentukan “warna dan corak”. Ilmu Kepolisian di Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang. Pangkajian teori-teori (yang kebanyakan berasal dari khazanah ilmu di dunia barat dalam praktek), serta penemuan kenyataan didalam praktek Kepolisian (*empiri*), Dapat dipakai untuk menyusun suatu teori baru dalam Ilmu Kepolisian (pendekatan keilmuan). Perkembangan suatu ilmu juga tidak bisa terlepas dari lingkungan masyarakat dimana ilmu itu tumbuh berkembang, agar tidak menghasilkan didikan yang terasing dari lingkungan masyarakatnya. Karena itu falsafah hidup masyarakat harus menjadi dasar pengembangan ilmu, yang dalam Ilmu Kepolisian merupakan landasan berupa *falsafah Ilmu Kepolisian*.

Dalam kegiatan-kegiatan ilmiah Ilmu Kepolisian, yang biasanya dilaksanakan dalam pranata-pranata pendidikan atau dalam kegiatan penelian, kurikulum yang dikembangkan dalam ilmu tersebut adalah sesuai dengan fungsi polisi dalam masyarakat dan tugas-tugasnya. Lebih lanjut Suparlan (1999) menjelaskan bahwa:

“Ilmu Kepolisian sebagai ilmu pengetahuan untuk profesi, menekankan kajiannya pada pengindentifikasian masalah-masalah dan isu-isu sosial yang terjadi dalam masyarakat serta pemecahannya secara professional, Karena itu pendekatan metodologinya menekankan pada pendekatan antara bidang (interdisciplinary approach). Sebuah ilmu pengetahuan ditandai oleh adanya paradigma yang dipunyai oleh ilmu-ilmu lainnya”⁴

Sehingga dalam program pengajaran yang multi-bidang, yang berkembang adalah pengajar mengenai masing-masing bidang ilmu, sehingga kita tidak hanya belajar ilmu yang akan menjadi acuan dalam praktek atau penerapan tugas-tugas saja, namun kita akan belajar secara akademik dan intelektual. Hal ini penting bagi pengembangan profesi Polri yang dapat mengembangkan konsep-konsep atau teori-teori demi kepentingan operasional Polri kedepan. Sedangkan konsep pengajaran yang bersifat antar-bidang merupakan penerapan beberapa disiplin ilmu

3 Hadi Suparto. (1) “Perkembangan Ilmu Kepolisian” suatu studi perbandingan, majalah Bhayangkara, edisi 14/1990. (2) “Identitas Kepolisian” suatu pendekatan Manajerial Pendidikan, pidato Dies PTIK 1982.

4 Makalah dengan judul “Ilmu Kepolisian dan Dinamika Masyarakat” dalam orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis PTIK ke-53 di PTIK, Jakarta

yang terkait dan dalam hubungan yang saling mendukung dalam suatu kerangka teori atau metode guna menganalisa dan memahami serta menerapkan didalam memecahkan permasalahan yang bersifat lebih kompleks dan berdampak luas pada masyarakat dan tugas Polri.

Harapan yang muncul dari lembaga pendidikan PTIK diantaranya adalah dengan mempelajari dan mengembangkan Ilmu Kepolisian, para petugas Polri akan mampu mengimplementasikan dalam pelaksanaan praktek pemolisiannya sebagai berikut:

- Mengamati fenomena di sekelilingnya dengan cermat (observasi terhadap sebagai gejala atau peristiwa, menemukan data yang bermanfaat bagi pemolisiannya,
- Menganalisa gejala/peristiwa fenomena yang terjadi secara kritis, dialektis, komparatif, maupun dialogis.
- Melihat, meramalkan atau memperediksi hubungan antara gejala yang satu dengan yang lainnya secara logis dan sistematis yang berguna dalam menentukan strategi-strategi pemolisiannya sebagai upaya preventif (*crime prevention*)
- Memecahkan sebagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dan memberikan solusinya (*problem solving policing*).

Mengembangkan kreatifitas dalam pemolisiannya sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan berguna dalam kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kualitas hidup masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya Polri dapat dipercaya oleh masyarakat, dan dapat melakukan pemolisiannya secara profesional yang bermanfaat untuk memperbaiki citranya .

Ilmu Kepolisian, PTIK dan Profesionalisme Polri

Ilmu Kepolisian, pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial, yang dianggap dapat mengganggu, merugikan, dan atau merusak tatanan kehidupan masyarakat dan lingkungan serta pranatra atau pemerintah yang mengemban tugas terwujudnya keteraturan sosial serta kesejahteraan hidup warga dan masyarakatnya. Masalah sosial yang termasuk

perspektif ini adalah berbagai bentuk kejahatan yang merupakan produk dari dinamika kehidupan sosial dari masyarakat, yang dapat berpotensi merugikan atau mengganggu sehingga harus dilarang, diredam atau ditumpas.

Sebagai suatu organisasi yang besar dan kompleks, Polri membutuhkan 3 (tiga) macam kemampuan yang harus dimiliki personil-personilnya, diantaranya adalah ;

(1) Kemampuan teknis professional khas Kepolisian; (2) kemampuan manajemen Kepolisian tingkat dasar, menengah dan tinggi; (3) kemampuan keahlian (seperti kedokteran, kimia, fisika, dan lain-lain yang direkrut dari sarjana atau dengan mengirim perwira Polri ke universitas dalam dan luar negeri). Kaitannya dengan hal dimaksud didalam mencermati perkembangan Ilmu Kepolisian yang tumbuh dan berkembang pada organisasi Polri maka diharapkan bagi setiap anggota Polri harus memiliki dan menguasai pengetahuan Ilmu Kepolisian dan tentunya mampu menjabarkannya dalam bentuk implementasi pada pelaksanaan tugas serta dapat mengembangkan profesionalismenya secara konsisten berdasarkan prediksi tantangan tugas yang akan dihadapi pada masa mendatang.

★ Sedangkan PTIK sebagai lembaga pendidikan yang menempa perwira Polri pada level Perwira Pertama (Pama) dan Perwira Menengah (Pamen) dalam memberikan kontribusi pada bidang keilmuan sebagai bekal praktek dilapangan nantinya, didalam program pendidikan harus mencakup teori-teori keilmuan yang terkait erat dengan masalah-masalah sosial serta kejahatan dan penanganannya dalam ruang lingkup yang tidak se-kompleks dan se-rumit serta sedalam yang diberikan dalam pendidikan untuk Perwira Tinggi (Pati), dengan penekanan pada operasionalisasi penanganannya. Hal ini harus mencakup pengetahuan tentang masalah sosial dan kejahatan, peng-identifikasi-annya, acuan atau referensi konsep serta teori yang ada relevansinya yang dapat memecahkan masalah-masalah tersebut, perorganisasian dan strategi-strategi penanganannya. Dengan harapan PTIK menghasilkan *out-put* yang lebih baik, professional dan responsif terhadap perubahan-perubahan dalam konsep aman dan terhadap kebutuhan akan rasa aman yang dimiliki oleh warga masyarakat.

Sedangkan harapan masyarakat tentang peranan profesi kepolisian menurut Mardjono Reksodiputro adalah pada dua fungsi kepolisian yaitu: penegakan hukum (*law enforcement*) dan penyelesaian masalah (*conflict management*). Dalam fungsinya yang pertama, masyarakat mengharapkan sosok polisi professional

yang berani, menghargai atasan, dapat dipercaya menyelesaikan tugas dan taat pada perintah. Tetapi masyarakat juga ingin melihat sosok polisi yang berada dalam fungsinya yang kedua dalam; penyelesaian masalah (*conflict management*) dengan gambaran, sosok polisi yang pandai (*intelligent*) punya akal sehat (*common sense*) bersifat ramah (*friendly*) menghormati sesama warga (*courtesy*), dan punya kesabaran (*patience*).⁵

Professionalisme pekerjaan Polri mencerminkan suatu sikap dan cara yang dilakukan dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi jiwa dan kemerdekaan publik atau masyarakat yang dilayani. Pandangan publik mengenai citra lembaga kepolisian tercipta dan hal-hal tersebut, sehingga secara tidak langsung menyatakan bahwa tingkat keahlian yang diraih melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang membedakan mereka dan orang lain dengan kualitas dan dedikasi dalam layanan publik. Dapat disimpulkan bahwa seorang professional akan selalu berusaha meningkatkan standar tingkah laku dan kinerjanya. Menurut Suparlan, professional polisi mungkin hanya dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan konseptual dan teoritikal mengenai berbagai permasalahan sosial dan kepolisian, dan kemampuan analisa untuk mengatasi atau meredamnya. Berbagai permasalahan sosial serta berbagai bentuk kejahatan yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat mejemuk Indonesia sekarang ini hanya mungkin dapat dipecahkan dan diatasi dengan menggunakan teori-teori dari ilmu-ilmu pengetahuan secara antar-bidang. Ilmu Kepolisian antar-bidang dibangun dan dikembangkan serta digunakan sebagai acuan bagi peningkatan profesi petugas kepolisian. (Suparlan:1999)

Professional polisi hanya mungkin dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan konseptual dan teoritikal mengenai berbagai permasalahan sosial dan kepolisian, dan kemampuan analisa untuk mengatasi atau meredamnya (Suparlan:1999). Berkaitan dengan hal tersebut Polri dalam mengembangkan sistem pemolisianannya dengan memanfaatkan atau berdasarkan pengkajian atau penelitian yang dilakukan atau dikembangkan dalam Ilmu Kepolisian. Menurut Prof. Azhar Kasim (2002) mengemukakan pendapat bahwa:

5 Professionalisme dapat diartikan menurut William G Bailey (ed 1995:784) adalah merupakan suatu keadaan pikiran, standar tingkah laku, citra dan kemampuan, kepekaan dan kumpulan sikap sejenis seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang mengikuti suatu panggilan, yang menjalankan seni dan ilmu dari suatu lapangan pekerjaan serta menunjukkan fungsi suatu pekerjaan.

“Sekarang ini sifat hakikat pekerjaan dan organisasi di sektor modern adalah pekerjaan yang berbasis pengetahuan (*knowledge based works*) dan kebutuhan sumberdaya manusia juga berubah ke arah pekerjaan yang bersifat rutin (*meaningless repetitive task*) mulai diganti dengan tugas pekerjaan yang menekankan pada inovasi dan perhatian (*innovation and carin*) Keterampilan dan keahlian tunggal mulai ditinggalkan diganti dengan profesionalisasi dengan keahlian ganda. Disamping itu penugasan yang bersifat individual mulai berubah menjadi pekerjaan tim (*team work*).”

Fungsi polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut

Acuan Kepustakaan

Bayley William G, 1995 *The Encyclopedia of Police Science (second edition)*. Newyork & London, Garland Publishing.

Bahtiar, Harsya W, 1994. Ilmu Kepolisian: suatu cabang ilmu baru, Jakarta PTIK-Gramedia

Brotodiredjo Soebroto, 1999 Pengantar Hukum Kepolisian, Jakarta, Yuseha

Bayley David H, 1994, *Police for the Future* (diterjemahkan dan disadur oleh KUNarto), Cipta Manunggal, Jakarta

1991, *Forces of Order Policing Modern in Japan*, University of California Press

Djamin, Awaloeddin, 1999 Menuju Polri Mandiri yang professional, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja.

Friedmann Robert, 1992 *Community Policing*, diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto) Jakarta Cipta Manunggal.

Kasim Azhar Prof. DR. 1998, Reformasi Administrasi Negara Sebagai Prasyarat Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional (Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Fisipol UI) Universitas Indonesia Jakarta

-----1995, Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi, Jakarta Universitas Indonesia

-----1995,, Teori Pembuatan Keputusan, Jakarta Universitas Indonesia

Kunarto, 1995, Polisi Harapan dan Kenyataan, Klaten, CV Sahabat

-----1997 Etika Kepolisian, Jakarta, Cipta Manunggal

-----1997 Ham dan Polri, Jakarta Cipta Manunggal

-----1998 Tribrata, Jakarta, Cipta Manunggal

Suparlan Parsudi 1997, Polisi dan Fungsinya dalam Masyarakat, Diskusi Angkatan I KIK Program S2 UI

-----1999a Makalah Sarasehan “ Etika Publik Polisi Indonesia” tanpa penerbit

-----1999b Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Seminar Hukum Internasional VII, Departemen Kehakiman

-----1999c Ilmu Kepolisian dan Dinamika Masyarakat, Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalie PTIK ke 53 ARMA - WASPADA

-----2000 Masyarakat majemuk dan perawatannya, Jurnal Antropologi, Jakarta, Yayasan Obor.

-----2001 Kajian Ilmu Kepolisian, Partnership Governance Reform In Indonesia 23-24 Oktober 2001

-----2003 Ceramah dalam Seminar tentang Pemolisian Komuniti, Polres Jakarta Utara

Suseno Frans Magniz, 1999 Kuasa dan Moral Jakarta, Gramedia

-----1999 Etika Politik Jakarta Gramedia

-----2000 Mencari sosok Demokrasi, Jakarta, Gramedia

Toha, Miftah, 2003 Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta Rajawali Press

Trojanowicz Robert, 1998 *Community Policing: How To Get Started*, Co-Authorred with *policing coms Bonnie Bucqueroux* (Anderson Publishing. Cincinnati, OH)

